

Humas Biro Pemberitaan DPR RI Dalam Analisis Pest

Irfan Fauzi ¹, Veranus Sidharta ²

¹Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Ilmu Komunikasi
irfan.ifr@bsi.ac.id

²Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Ilmu Komunikasi
veranus.vri@bsi.ac.id

ABSTRAKSI

DPR RI sebagai lembaga legislatif yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki fungsi sebagai pembuat, pengusul, pengesah undang-undang, pengawas lembaga eksekutif dan menyusun APBN dituntut memiliki citra positif dimata masyarakat Peran humas sangat diperlukan dalam hubungan antara lembaga dan publiknya, menciptakan citra baik bagi lembaga dan membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Analisis PEST digunakan sebagai komponen untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal pada pengaruh faktor peluang dan ancaman terhadap kondisi dan situasi yang terjadi saat ini dengan memanfaatkan peluang serta mengantisipasi terjadinya ancaman dari eksternal lembaga. DPR RI secara kelembagaan memiliki dua karakteristik yang meliputi lembaga sementara dan lembaga tetap. Kebijakan Ekonomi dan Anggaran, DPR RI membahas serta memutuskan persetujuan atau tidak terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN, faktor sosial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan media dalam penyebaran informasi Sedangkan faktor Teknologi mencakup aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi berupa akses ketersediaan data dan informasi.

Kata Kunci: Humas, Analisis PEST

ABSTRACT

The DPR RI as a legislative body whose members are directly elected by the people and have functions as maker, proposer, legislator, executive supervisor and APBN preparation are required to have a positive image in the eyes of the public. The role of public relations is indispensable in the relationship between institutions and the public, creating a good image for institutions and fostering positive and mutually beneficial relationships with the public. PEST analysis is used as a component to identify external forces on the influence of opportunity and threat factors on current conditions and situations by taking advantage of opportunities and anticipating threats from external institutions. The DPR RI institutionally has two characteristics which include temporary institutions and permanent institutions. Economic and Budget Policy, the DPR RI discusses and decides whether or not to approve a draft law on the State Budget, social factors include aspects related to the use of media in disseminating information while the technology factor covers aspects of information and communication technology in the form of access to availability data and information

Key Words: Public Relations, PEST Analysis

PENDAHULUAN

DPR RI sebagai lembaga legislatif yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki fungsi sebagai pembuat, pengusul, pengesah undang-undang, pengawas lembaga eksekutif dan menyusun APBN dituntut memiliki citra positif dimata masyarakat yang dalam hal tersebut diperlukan Humas sebagai bentuk terjadinya komunikasi kedalam ataupun keluar lembaga untuk mencapai tujuan pengertian bersama. (Jefkins, 1986).

Peran humas sangat diperlukan dalam hubungan antara lembaga dan publiknya, menciptakan citra baik bagi lembaga dan membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan publiknya (Saputra & Nasrulah, 2011: 50). Oleh karenanya dalam rangka mengelola citra DPR RI, fungsi *public relations* atau kehumasan memiliki peranan penting sehingga mekanisme dalam pengelolaan kehumasan menjadi hal utama bagi DPR-RI agar terhindar dari salah komunikasi dan salah persepsi masyarakat terhadap DPR-RI sebagai lembaga penyelenggara negara.

Sangat penting untuk humas DPR RI terkait keterlibatannya dalam mempublikasikan kinerja anggota dewan guna menjaga reputasi kinerja anggotanya. DPR RI sebagai lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan, berfungsi sebagai pembentuk kebijakan publik dan undang-undang, mengesahkan APBN, serta fungsi pengawasan wajib memiliki reputasi yang baik agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja DPR RI. Dipilihnya anggota DPR RI oleh rakyat secara langsung juga merupakan alasan mengapa humas DPR harus berperan dalam menjaga reputasi kinerja organisasi ini dengan mempublikasikan kinerja anggota dewan dan kebijakan lembaga.

Berdasarkan peran dan fungsi humas DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu dikaji dalam analisis PEST berkaitan dengan pengaruh lembaga sebagai ruang lingkup suatu organisasi yang dilihat dari segi Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi yang lazim disebut dengan *PEST* sebagai alat untuk melihat pengaruh lingkungan yang terjadi diluar lembaga dan dapat diambil sebagai suatu peluang atau ancaman serta posisi dan situasi bagi suatu lembaga. (Ward & Preppard, 2002).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan analisis *PEST* terkait dengan strategi Humas DPR RI yang berperan dalam menjaga reputasi organisasi dengan mengidentifikasi peran humas DPR RI dalam membangun dan menjaga reputasi serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menjadi

kendala dalam menjaga reputasi sebagai lembaga legislatif terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk mengetahui strategi media relations humas dalam mengelola citra positif dan dalam mengatasi pemberitaan negatif mengenai DPR RI dengan menggunakan analisis *PEST* (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi).

Konsep dan Teori Humas

Humas atau *Public Relations* adalah sebuah divisi atau bagian maupun departemen dalam sebuah lembaga atau organisasi. Humas bertugas antara lain adalah melakukan perencanaan strategi tentang publikasi dan melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap publik eksternal untuk memberikan informasi yang layak disampaikan kepada mereka dan memiliki fungsi lainnya untuk membuat berbagai macam kegiatan serta program yang bertujuan untuk membangun citra positif organisasi.

Tugas Humas adalah mengurus berbagai keperluan yang berhubungan dengan komunikasi dengan publiknya, mulai dari membuat news release, konferensi pers, penyedia informasi kepada wartawan, memproduksi majalah, mengatur acara, serta menerima kunjungan. humas memiliki fungsi antara lain sebagai pemberi saran kepada pihak manajemen perusahaan, melakukan publisitas, melakukan research, membangun keterlibatan yang efektif dalam kebijakan publik, mengadakan special event, memajemen isu, fund raising, memadukan aktifitas pemasaran dengan mengadakan kegiatan khusus sekaligus membangun citra perusahaan, serta menjaga hubungan baik dengan para karyawan, media, industri, para penanam modal, dan kelompok-kelompok masyarakat lain. (Jefkin, 1992), humas, juga berperan sebagai komunikator, *back up management*, menciptakan program, mengkonsep berbagai naskah, pemecah masalah, *mediator*, dan membangun citra perusahaan atau organisasi. (Ruslan, 2010).

Cutlip, Center, dan Broom (2006) dalam *Effective Public Relations*, terdapat empat peran utama humas pada sebuah organisasi, yaitu *communication technician*, *expert prescriber*, *communication fasilitator*, dan *problem-solving fasilitator*. Peran humas sebagai *communication technician* artinya humas berperan sebagai pelaksana komunikasi di dalam organisasi dan peran humas sebagai *expert prescriber* berarti humas adalah seorang ahli yang memberikan saran, nasehat kepada pimpinan organisasi. Disisi lain, peran humas sebagai *communication fasilitator* berarti humas adalah jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan dan peran humas sebagai *problem-*

solving facilitator berarti humas memfasilitasi pemecahan masalah di dalam organisasi.

Dari penjabaran peran-peran Humas tersebut, peran Humas terbesar pada sebuah organisasi adalah menciptakan, meningkatkan, membangun, dan menjaga citra sebuah organisasi. Hal yang sangat penting bagi organisasi adalah citra karena dari citra inilah publik dapat melihat dan berpendapat mengenai suatu organisasi. Publik memberikan penilaian kepada sebuah perusahaan didasarkan pada citra yang dibentuk dari perusahaan itu sendiri. Citra merupakan serangkaian kesan seseorang, anggapan, atau ide terhadap suatu objek sehingga memungkinkan antara seseorang dan orang lainnya mempunyai kesan yang berbeda terhadap objek perusahaan (Dowling, 2002: 20-21).

Peran Humas

Humas mempunyai peran ganda, yaitu keluar memberikan informasi sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi atau lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini masyarakat, diserasikan demi kepentingan atau tujuan bersama. Humas sebagai fungsi komunikasi memiliki dua pengertian yaitu :

1. Humas diartikan sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan seorang atasan terhadap bawahan ataupun khalayaknya, baik khalayak internal maupun eksternal, dengan tujuan menumbuhkan pengertian bagi organisasi.
2. Humas dimaknai sebagai kegiatan komunikasi yang dibangun dalam satu wadah khusus seperti, Biro, Bidang, Devisi, Departemen, Bagian. Pelembagaan ini menunjukkan bahwa program kerja humas merupakan program kerja yang terorganisir, terencana dan sistematis.

Dalam bukunya *Effective Public Relations* (2000), (Cutlif, Center & Broom, 2000:45) memaparkan peran humas, sebagai berikut :

- a. *Expert Prescriber*, humas sebagai *Expert Prescriber*, adalah seorang ahli yang dapat memberikan saran, nasehat, kepada pimpinan organisasi. Hubungan antara humas dan pimpinan organisasi diibaratkan seperti hubungan antara dokter dan pasien
- b. *Communication Facilitator*, humas sebagai *Communication Facilitator* berperan sebagai jembatan komunikasi antara

lembaga atau perusahaan dengan publiknya. Humas menjadi mediator ketika terjadi miss communication antara lembaga dengan publiknya.

- c. *Problem Solving Process Facilitator*, humas sebagai *Problem Solving Process Facilitator*, berperan memfasilitasi pemecahan masalah. Humas terlibat langsung dalam penanganan masalah, menjadi anggota tim atau menjadi pimpinan tim penanganan masalah.
- d. *Communication Technican*, humas sebagai *Communication Technician*, berperan sebagai pelaksana teknis komunikasi. Humas bertugas menyediakan dan melaksanakan layanan teknis komunikasi. Keputusan dan kebijakan mengenai teknik komunikasi mana yang akan digunakan bukanlah keputusan petugas humas, melainkan keputusan manajemen.

Tugas dan Fungsi Divisi Humas DPR RI

Divisi Humas Biro Pemberitaan Parlemen memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan informasi, kehumasan, dukungan pemberitaan, mengelola progsm televisi dan radio, serta mengelola urusan penerbitan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Divisi Humas Biro Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pemberitaan Parlemen
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pemberitaan Parlemen
3. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pemberitaan Parlemen
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan
6. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan
7. Penyelenggaraan hubungan masyarakat
8. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website
9. Penyelenggaraan televisi dan radio
10. Penyelenggaraan kehumasan
11. Penyelenggaraan urusan penerbitan

12. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Persidangan
13. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan.
14. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen

Divisi Humas Biro Pemberitaan Parlemen terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat, melaksanakan penerangan kepada masyarakat dan pelayanan informasi publik
- b. Bagian Media Cetak dan Media Sosial, mempunyai tugas mengelola pemberitaan dimedia cetak, media sosial, dan website, serta melaksanakan analisis media
- c. Bagian Penerbitan, mempunyai tugas melaksanakan urusan penerbitan produk
- d. Bagian televisi dan Radio Parlemen, Mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan televisi dan radio.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan badan keahlian

Divisi Hubungan Masyarakat

Divisi Hubungan Masyarakat memiliki tugas melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsinya sebagai :

- a. Penyusunan bahan kegiatan di bidang Hubungan Masyarakat
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bagian Hubungan Masyarakat
- c. Penyiapan bahan materi dan pelaksanaan penerangan tentang keparlemenan
- d. Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat
- e. Pelaksanaan kehumasan
- f. Pelayanan informasi publik
- g. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada kepala Biro Pemberitaan Parlemen

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEST Analysis

Analisis PEST digunakan sebagai komponen untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal pada pengaruh

faktor peluang dan ancaman terhadap kondisi dan situasi yang terjadi saat ini dengan memanfaatkan peluang serta mengantisipasi terjadinya ancaman dari eksternal lembaga. Pest analysis merupakan analisa untuk menentukan keputusan sebagai strategi selanjutnya berkaitan dengan kondisi dan situasi yang terjadi dalam lingkup eksternal meliputi bidang politik, ekonomi, social serta teknologi. (Ward & Peppard, 2002).

Terdapat empat faktor yang mendasari analisis PEST yaitu ; (1). Politik, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang mengatur kehidupan bernegara dengan peraturan perundang-undang yang dibuat dalam berbagai aspek. (2). Ekonomi, berkaitan dengan kebijakan perekonomian serta anggaran dan rencana program-program. (3). Sosial, berkaitan dengan aktivitas ikatan social hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. (4). Teknologi, Faktor teknologi mencakup aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi berupa akses ketersediaan data dan informasi.

Tabel 1. Analisis Pest Humas Biro Pemberitaan DPR RI

POLITIK
Instrumen politik meliputi; <ol style="list-style-type: none"> 1. Legal. Terdiri dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Kebijakan Berkaitan dengan kegiatan Humas dalam perumusan dan rencana strategis, evaluasi program kerja, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik serta pelaksanaan kebijakan dibidang pemberitaan. 3. Kelembagaan Secara kelembagaan DPR RI memiliki kelengkapan sebagai lembaga penyelenggara Negara dengan Ketua dan Wakilnya , Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus.
EKONOMI
Faktor ekonomi meliputi kebijakan perekonomian serta anggaran yang ditetapkan dalam APBN serta anggaran dalam kegiatan dan rencana program-program.
SOSIAL
Faktor sosial mencakup aspek-aspek yang terkait

dengan Pemanfaatan media dalam penyebaran informasi kebijakan/informasi publik, layanan masyarakat dan program berbagai event (kegiatan/acara) serta hubungan dengan media.

TEKNOLOGI

Faktor teknologi mencakup aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi.

KESIMPULAN

PEST analisis pada pembahasan memuat elemen-elemen instrumen Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi. Elemen politik memuat wewenang serta fungsinya dalam pembentukan dan perubahan Undang-Undang. Instrumen kebijakan meliputi penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kegiatan, program tahunan dan evaluasi rencana strategis.

Dalam instrumen Ekonomi dan Sosial meliputi ; Kebijakan Ekonomi dan Anggaran, dimana DPR membahas serta memutuskan persetujuan atau tidak terhadap sebuah rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden, serta faktor sosial mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan media dalam penyebaran informasi. Sedangkan faktor Teknologi mencakup aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi berupa akses ketersediaan data dan informasi.

REFERENSI

- Baskin, O., Aronoff, C., & Lattimore, D. 2007. *Public Relations : The Profession and The Practice, 4th Edition*. New York : Mc Graw Hill
- Cutlip, S.M., Center, A.H., & Broom, G.M., 2006. *Effective Public Relations, 9th Edition*. New Jersey : Pearson Prentice Hall
- Dowling, Grahame. 2002. *Creating Corporate Reputation : Identity, Image and Performance*. London: Oxford University Press
- Holtz, Shel. 2002. *Public Relations on The Net 2 Second Edition*. New York : Amacom
- Jenkins, Frank. 1992. *Public Relations*. Jakarta : Erlangga
- Jenkins, Frank. 1986. *Planned Press and Public Relations*. Edisi 2. Blackie.
- Kusumastuti, Frida. 2001. *Dasar-Dasar Humas*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Ruslan, Rosadi. 2010. *Manajemen Public Relation & Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Seitel, Fraser. 2004. *The Practice of Public Relations Ninth edition*. New Jersey : Pearson Education. Inc.

Ward & Peppard. 2002. *Strategic Planning for Information System*. Third Edition.

John Willey & Sons. 2002.

<http://www.dpr.go.id/>

PROFIL PENULIS

Irfan Fauzi Arief, Lahir di Pandeglang, 14 Februari 1976. Menyelesaikan S1 bidang Pengembangan Masyarakat di Universitas Djuanda, S2 Magister Science bidang Manajemen Pembangunan Sosial, Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia, dan S3 di Bidang Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid Jakarta. Sejak 2005 aktif sebagai Peneliti dan Konsultan bidang Social Engineering dan CSR yang hasil risetnya dipakai oleh berbagai perusahaan Migas dan Non Migas Multi Nasional. Namun sejak 2015 juga aktif sebagai Konsultan Komunikasi Politik untuk Pileg dan Pilkada. Hingga kini terdaftar sebagai member Diaspora Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Irfan juga pernah bekerja bidang Public Relation diperusahaan Migas Nasional dan Asing selama lebih dari 12 tahun, 5 Tahun bekerja sebagai Staf Ahli Menteri Sosial RI Pada Kabinet Indonesia Bersatu-II dan lebih dari 20 tahun bekerja dibidang Rekayasa Sosial dan CSR/Social Investment. Sering menjadi narasumber pada berbagai talk show di Media Nasional seperti Elshinta, Smart FM, RRI, TVRI, JakTV, maupun narasumber pada seminar dan lokakarya nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Tokyo & Kisarazu Jepang, Melbourne Australia, Oakland New Zealand, Bangkok Thailand, Istanbul Turkey dan berbagai negara di Asia lainnya. Saat ini, selain bekerja sebagai Dosen Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), dan Konsultan CSR/Komunikasi Politik, Irfan juga bekerja sebagai CEO PT Lingkung Gunung Sejahtera, Direktur Paramitra Foundation, CEO PT. Hijau Sejahtera Indonesia, Komisaris Utama di PT. Satuenam Solusindo dan Komisaris Utama PT Autopay Asia.

Veranus Sidharta, dilahirkan di Tegal pada 9 juli 1976, pendidikan tinggi yang sudah diraih S1 ilmu komunikasi Universitas Bhayangkara Jakarta, S2 Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Tercatat sebagai mahasiswa aktif angkatan 2019 pada Program Doktor Ilmu Komunikasi Pembangunan Institut Pertanian Bogor. Karir sebagai dosen di Universitas Bina Sarana

Informatika dimulai pada tahun 2020 Bulan Februari. Jurnal yang sudah diterbitkan diantaranya ; Food Supply Chain And Food Security During the Covid-19 Pandemic (2020), Pengarusutamaan Gender: Studi Kasus Jurnalis Perempuan Metro TV(2020), Pemasaran Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pilkada Surabaya 2015 (2018), Media and Cultural Industries Production. (2016), Hubungan Citra Dan Loyalitas Anggota Motor Harley Davidson Club Indonesia Di Kota Bekasi (2015). Buku yang sudah diterbitkan diantaranya, Media, Communication And Society Empowerment 2016, Diskursus Covid-19 Dalam Perspektif Komunikasi Jaringan Komunikasi Serikat Nelayan Indonesia Melalui Modal Sosial Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Indramayu 2020

